

PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DI KOTA DUMAI DAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Hadriana

Dosen Prodi Bahasa Inggris FKIP Universitas Riau

E-mail: ad1208@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendapatkan gambaran tentang kompetensi siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris yang diujikan pada Ujian Nasional; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab siswa belum menguasai standar kompetensi/kompetensi dasar yang diujikan pada Ujian Nasional; dan (3) merumuskan alternatif pemecahan masalah yang valid dan siap diimplementasikan secara konkrit di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan tingkat kualifikasi sekolah, yaitu sekolah yang berkualitas tinggi (SMAN 1 Dumai), sekolah yang berkualitas sedang (SMAN 2 Tanah Putih) dan sekolah yang berkualitas rendah (SMAN I Tanah Putih Tanjung Melawan). Objek penelitian ini adalah mata pelajaran Bahasa Inggris. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa aspek dari Delapan Standar Nasional Pendidikan yang belum berjalan sebagai mana mestinya, sehingga perlu adanya beberapa pembenahan.

Kata kunci: *standar kompetensi, kompetensi dasar, ujian nasional*

Abstract: The purpose of this research are: (1) to get clear description of students' success in achieving basic competence on National Final Examination; (2) identify factors that caused inability of the students to acquire basic standard competence stated by the government; and (3) formulate alternative solution to increase the students' standard competence in Dumai and Rokan Hilir Regency. The sample of this research were chosen based on the qualification of the school, SMAN I Dumai, SMAN 2 Tanah Putih and SMAN I Tanah Putih Tanjung Melawan. The object of the research is English. There were two kinds of data needed in this research. Primary data gained from indepth interview, observation and questionnaire, while secondary data obtained from documentation study. The result of the research indicated that some of the eight aspects stated by National Standard of Education were not applied well, so it needs improvement.

Key words: *standard competency, basic competency, national final examination.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan usaha yang komprehensif untuk meningkatkan martabat dan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mengembangkan diri sebagai warga Indonesia yang utuh. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan tingkatan pendidikan (Depdiknas, 2003).

Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional, perlu diadakan suatu pengukuran terhadap pencapaian kompetensi siswa. Hal ini dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Ujian Nasional (Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2010). Disamping itu, ujian nasional dapat membantu pemerintah, khususnya pemerintah kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan arah kebijakan dibidang pendidikan.

Selaras dengan pendapat diatas, Maman (2009) mengemukakan bahwa Ujian Nasional merupakan informasi potensial yang dapat berperan sebagai motivator bagi guru, siswa, sekolah, dan pelaku pendidikan lainnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah karena dapat digunakan sebagai pembandingan prestasi siswa antar sesama, maupun antar sekolah, kabupaten, provinsi, bahkan secara nasional.

Secara nasional, pemetaan hasil nilai Ujian Nasional (UN) dianalisis oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, yang dipaparkan dalam bentuk persentase penguasaan materi soal yang dibuat mulai dari tingkat sekolah, rayon, propinsi sampai ke tingkat nasional. Hasil analisis ini penting karena Ujian Nasional merupakan salah satu indikator mutu pendidikan. Berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris masih belum begitu memuaskan.

Pemerintah kota Dumai dan kabupaten Rokan Hilir melalui dinas Pendidikan secara bertahap telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, diantaranya dengan meningkatkan kualitas guru dengan pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2, melengkapi sarana dan prasarana belajar dengan memperbaiki gedung sekolah, melengkapi alat dan bahan laboratorium, melengkapi buku-buku di perpustakaan, meningkatkan mutu manajemen pendidikan melalui pelaksanaan workshop dan pelatihan-pelatihan baik untuk guru maupun

kepala sekolah.

Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa berbagai indikator mutu pendidikan masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Menurut Ashaluddin Jalil, Rektor Universitas Riau, dari tahun ke tahun calon mahasiswa asal Riau (tampa merinci asal kota/kabupatennya) yang lulus melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk Universitas Riau jumlahnya sangat sedikit. Tahun 2009 hanya 16% calon mahasiswa baru yang lulus mengikuti SNMPTN untuk Universitas Riau (Riau Pos 2011). Ketidakpuasan berjenjang juga terjadi, dimana kalangan guru dan kepala sekolah merasa bekal lulusan SD kurang mampu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP dan kalangan guru dan kepala sekolah SMA merasa lulusan SMP tidak siap mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah menengah atas. Kalangan perguruan tinggi juga merasa bekal lulusan SMA belum siap untuk mengikuti perkuliahan.

Berdasarkan data dari Badan Standar Nasional tahun ajaran 2009/2010 tingkat kelulusan siswa SMA pada ujian nasional untuk Kota Dumai dan Rokan Hilir berada pada peringkat keenam dari dua belas Kabupaten/Kota yang ada di Profinsi Riau. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya materi pelajaran yang belum dikuasai peserta didik dengan baik. Besarnya persentase penguasaan materi yang masih berada dibawah standar kelulusan pada ujian nasional untuk setiap bidang studi yang diuji pada ujian nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Persentase Penguasaan Materi Ujian nasional yang Belum Mencapai Standar kelulusan untuk kelompok IPA.

No	Tahun	Kota / Kabupaten	Mata Pelajaran					
			B. Ind	B. Ing	Matem.	Fisika	Kimia	Biologi
1	2007 -	Dumai	12%	20%	2,5%	10%	5%	12,5%
	2008	Rokan Hilir	26%	48%	35%	30%	32,5%	27,5%
2	2008 -	Dumai	14%	6%	0%	5%	0%	20%
	2009	Rokan Hilir	24%	30%	35%	32,5%	17,5%	40%
3	2009 -	Dumai	22%	4%	2,5%	7,5%	12,5%	5%
	2010	Rokan Hilir	10%	8%	0%	22,5%	7,5%	12,5%

Tabel 2: Persentase Penguasaan Materi Ujian nasional yang Belum Mencapai Standar kelulusan untuk kelompok IPS.

No	Tahun	Kota / Kabupaten	Mata Pelajaran					
			B. Ind	B. Ing	Matem.	Fisika	Kimia	Biologi
1	2007 -	Dumai	34%	42%	47,5%	12,5%	57,5%	22,5%
	2008	Rokan Hilir	26%	36%	22,5%	15%	50%	15%
2	2008 -	Dumai	30%	14%	2,5%	7,5%	10%	25%
	2009	Rokan Hilir	32%	12%	5%	20%	12,5%	22,5%
3	2009 -	Dumai (A)	26%	0%	2,5%	25%	32%	34%
		Dumai (B)	10%	6%	7,5%	15%	30%	30%
	2010	Rohil (A)	36%	4%	7,5%	22,5%	32%	32%
		Rohil (B)	14%	12%	7,5%	15%	30%	18%

Dari kedua tabel diatas dapat dikatakan bahwa persentase penguasaan materi yang belum mencapai standar kelulusan pada mata pelajaran Bahasa Inggris di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir belum memuaskan. Analisis hasil Ujian Nasional Bahasa Inggris pada kelompok IPA hanya mampu dicapai sebesar 12% dan 48% pada tahun 2007, 6% dan 30% pada tahun 2008/2009 dan mengalami penurunan menjadi 4% dan 8% pada tahun 2009/2010.

Analisis hasil Ujian Nasional Nasional Bahasa Inggris pada kelompok IPS hanya mampu dicapai sebesar 42% dan 36% pada tahun 2007, 14% dan 12% pada tahun 2008/2009 dan 0% sampai 12% pada tahun 2009/2010. Data ini memang cukup memprihatinkan. Untuk itu perlu diadakan suatu penelitian untuk dijadikan masukan yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan sekaligus memberikan arah pada kebijakan pendidikan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendapatkan gambaran tentang kompetensi siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris yang diujikan pada Ujian Nasional; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab siswa belum menguasai standar kompetensi/ kompetensi dasar yang diujikan pada Ujian Nasional; dan (3) merumuskan alternatif pemecahan masalah yang valid dan siap diimplementasikan secara konkrit di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut: (1) Data mengenai

kompetensi dasar Bahasa Inggris yang belum dikuasai peserta didik yang diuji secara nasional; (2) Faktor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut untuk mata pelajaran Bahasa Inggris yang diuji secara nasional; dan (3) Model peningkatan mutu pendidikan yang valid dan siap diimplementasikan secara konkret dapat dijadikan pedoman bagi pihak terkait terutama dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, MGMP, KKG, dan K3S untuk membuat arah kebijakan.

LANDASAN TEORI

1. Proses Pendidikan

Kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan merupakan proses pendidikan. Bagaimana proses pendidikan dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan (Umar 1994)

Kualitas proses pendidikan tergantung kepada dua aspek yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Walaupun komponen-komponennya baik, seperti tersedianya sarana dan prasarana serta biaya yang cukup, bila tidak dikelola dengan baik, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Demikian pula sebaliknya, pengelolaan yang baik dengan kondisi yang serba kekurangan akan mengakibatkan hasil yang juga tidak maksimal.

Pengelolaan pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, dan mikro. Pengelolaan proses dalam lingkup makro berupa kebijakan-kebijakan pemerintah. Pengelolaan dalam ruang lingkup meso merupakan implikasi kebijakan-kebijakan nasional kedalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah tanggung jawab Dinas pendidikan. Pengelolaan dalam ruang lingkup mikro merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah ataupun kelas dan satuan-satuan pendidikan lainnya. Dalam ruang lingkup ini kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan memegang peranan penting di dalam pengelolaan pendidikan untuk menciptakan kualitas proses dan pencapaian hasil pembelajaran.

Yang menjadi tujuan utama pengelolaan proses pendidikan adalah terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Sebab, berkembangnya tingkah laku peserta didik sebagai tujuan belajar hanya dimungkinkan oleh adanya pengalaman belajar yang optimal. Pengelolaan proses pendidikan harus pula memperhitungkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat.

2. Sistem Pendidikan Nasional

Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang Undang tersebut dinyatakan "Sistem Pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang aktif dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional".

Semua jalur pendidikan dalam fungsi, proses dan aktifitasnya haruslah bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang Undang no 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa dan berbudi pekerti luhur,

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa mtanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Konsekwensinya adalah seluruh jalur , jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut dalam wujud manusia Indonesia seutuhnya.

Sebagai suatu subsistem dari sistem nasional, pendidikan dipengaruhi oleh budaya, kondisi ekonomi masyarakat sekitar, kependudukan, politik dan keamanan. Disamping itu, sebagai sistem tersendiri, pendidikan nasional merupakan sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Tenaga guru, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta anggaran merupakan faktor internal yang senantiasa akan dipengaruhi oleh proses eksternal (Umar 1994).

Bagaimanapun kompleksnya tantangan pendidikan nasional yang dihadapi, namun pengelola pendidikan harus sungguh-sungguh dan konsisten dalam melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya harus mampu menciptakan manusia pintar dan terampil, tetapi juga beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berbudaya. Demikian pula pendidikan nasional bukan hanya berorientasi pada kepentingan lokal, melainkan juga kepentingan nasional bahkan keperluan global untuk perdamaian dunia yang lebih adil.

3. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Ujian Nasional

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kepada Badan Standar Pendidikan (BSNP) (Subagiyo 2008).

Untuk pelaksanaan UN tersebut, Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dab SMK Tahun Pelajaran 2010/2011. Dan Permendiknas

Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian nasional pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 (BSNP, 2011).

Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Nasional merupakan salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak peserta didik yang berkualitas dalam bidang akademik (Anonymous⁶, 2011).

Menurut Pujiharti (2007), Ujian Nasional merupakan salah satu instrument dalam evaluasi pendidikan dalam skala nasional. Tujuan dari ujian nasional harus jelas, serta tidak boleh terlepas dari proses pendidikan secara keseluruhan.

BSNP (2011) menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Adapun tujuan dari UN adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ujian Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memacu peningkatan mutu pendidikan. Ujian Nasional selain berfungsi untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi lulusan dalam mata pelajaran tertentu, serta pemetaan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, juga berfungsi sebagai motivator bagi pihak-pihak terkait untuk bekerja lebih baik guna mencapai hasil ujian yang baik.

Hasil UN dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan.
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
3. Penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan..
4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya

meningkatkan mutu pendidikan (BSNP, 2011).

4. Standar Nasional Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 2 disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan prasarana; (f) Standar pengelolaan; (g) Standar pembiayaan; dan (h) Standar penilaian pendidikan. Penjabaran dari kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Standar isi adalah cakupan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- c. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian dari standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL kita akan memiliki patok mutu (*bench-mark*) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggung jawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

- e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan

berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

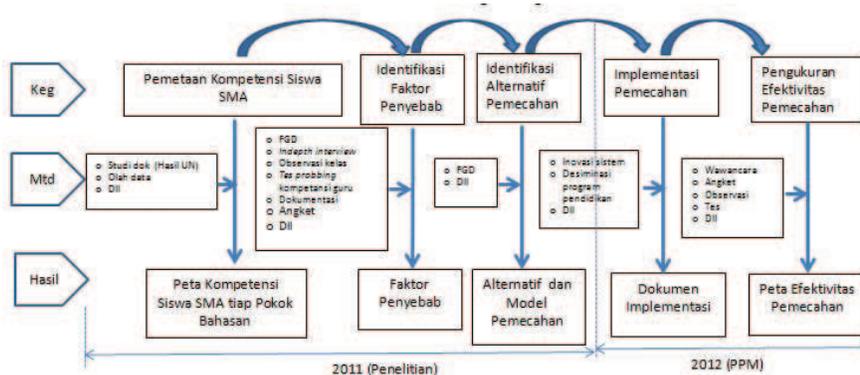
- h. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (*Descriptive Research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini mengacu pada kerangka dasar upaya peningkatan mutu pendidikan seperti tertera pada Gambar 1. Diharapkan hasil penelitian dapat memotret berbagai faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Gambar 1.
Kerangka Dasar Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan



Penelitian ini bertumpu pada latar belakang masalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai kompetensi siswa SMA Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir pada mata pelajaran Bahasa Inggris yang diujikan pada Ujian

Nasional serta untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya hasil yang diperoleh pada kompetensi tertentu.

Sumber data pada penelitian ini adalah: (1) *Person*, sumber data yang dapat memberikan

data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui kuesioner, untuk selanjutnya disebut *responden*. Responden pada penelitian ini adalah Kepala sekolah, guru mata pelajaran, siswa SMA dan masyarakat. (2) *Place*, sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam (ruangan belajar, kelengkapan alat dan lain-lain) dan bergerak (proses belajar mengajar) yang merupakan objek untuk observasi. (3) *Paper*, sumber data yang berupa huruf, angka, gambar atau simbol yang merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi.

Sampel pada penelitian ini adalah SMAN 1 Dumai, SMAN 2 Tanah Putih dan SMAN I Tanah Putih Tanjung melawan, sebagai perwakilan dari SMA yang berkualitas tinggi, sedang dan rendah. Teknik pemilihan dilakukan dengan mengurutkan nilai total yang diperoleh semua sekolah menengah atas yang ada di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir pada ujian nasional untuk setiap mata pelajaran dari tahun 2007-2008 sampai 2009-2010 dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Dari urutan itu lalu sekolah dikelompokkan menjadi sekolah yang mempunyai nilai total tinggi, sedang dan rendah. Ternyata, sekolah yang berada pada masing-masing kelompok untuk tiga tahun tersebut mempunyai nilai yang hampir sama. Untuk itu dipilihlah satu sekolah dari setiap kelompok dengan mempertimbangkan lokasi sekolah yang mudah dicapai.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan kuesioner sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Analisis data primer dilakukan secara deskriptif untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data dari langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis. Data sekunder yang berasal dari Pusat Penilaian Pendidikan BSNP tersedia dalam bentuk Microsof Acces. Selanjutnya data tersebut dikonversi menggunakan program Converter Abby. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase, tabel, dan grafik dan gambar. Proses kategorisasi dan klasifikasi data kualitatif

dilakukan secara bertahap atas jawaban-jawaban responden dan hasil identifikasi dianalisis menggunakan Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*) yang dilanjutkan dengan interpretasi. Pembahasan dilaksanakan dengan mempergunakan metode komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Inggris di SMA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan menyimak (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*) dan menulis (*writing*) dalam wacana yang berbentuk *recount, narrative, procedure, descriptive, report, analytical exposition, hortatory exposition, explanation, dan discussion* dalam konteks yang berdasarkan tingkat perkembangan dan minat siswa. Disamping itu siswa juga dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam memahami dan merespon makna dalam percakapan *transaksional dan interpersonal* resmi dan berlanjut dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan pembelajaran, empat jenis kemampuan, atau yang sering di sebut *the four language skills: listening, speaking, reading dan wtiting*, tidak dapat diajarkan secara terpisah, melainkan harus terintegrasi dalam berbagai bentuk wacana diatas. Dalam penyajiannya wacana yang berbentuk *recount, narrative, procedure, descriptive, report, analytical exposition, hortatory exposition, explanation, dan discussion* dan *percakapan transaksional dan interpersonal* resmi dan berlanjut dalam konteks kehidupan sehari-hari tersebut disebar mulai dari kelas X sampai semester 1 sampai dengan kelas XII semester 2. Akan tetapi ketika memasuki kelas XII semsester 2 biasanya semua materi ajar sudah diselesaikan proses pembelajarannya oleh guru sehingga pada semester 2 di kelas XII itu sebahagian besar waktu belajar digunakan untuk mengulang kembali semua materi ajar yang diberikan semenjak kelas X, dengan demikian diharapkan siswa punya banyak waktu untuk mengingat kembali materi pelajaran terdahulu dalam rangka menghadapi ujian nasional. Walaupun demikian hasil analisis penguasaan

materi soal Bahasa Inggris siswa SMA/MA di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir belumlah memuaskan.

Pada ujian nasional 2007/2008 ada 35 kompetensi dasar untuk mata pelajaran Bahasa Inggris yang tidak tuntas atau tidak mencapai standar kelulusan. Diantaranya: 13 kompetensi dasar terdapat pada materi pelajaran kelas X, 4 kompetensi dasar pada materi pelajaran kelas XI, dan 4 kompetensi dasar untuk materi pelajaran kelas XII, 6 kompetensi dasar yang terdapat pada materi pelajaran kelas XI dan XII, dan 8 kompetensi dasar materi pelajaran yang dipelajari pada kelas X, XI, dan XII.

Pada ujian nasional 2008/2009 ada 36 kompetensi dasar untuk mata pelajaran Bahasa Inggris yang tidak tuntas atau tidak mencapai standar kelulusan. Diantaranya: 16 kompetensi dasar terdapat pada materi pelajaran kelas X, 7 kompetensi dasar pada materi pelajaran kelas XI, dan 3 kompetensi dasar untuk materi pelajaran kelas XII, 3 kompetensi dasar materi pelajaran yang terdapat pada kelas XI dan XII, dan 7 kompetensi dasar materi pelajaran yang dipelajari pada kelas X, XI, dan XII.

Pada ujian nasional 2009/2010 ada 22 kompetensi dasar untuk mata pelajaran Bahasa Inggris yang tidak tuntas atau tidak mencapai standar kelulusan. Diantaranya: 7 kompetensi dasar terdapat pada materi pelajaran kelas X, 6 kompetensi dasar pada materi pelajaran kelas XI, dan 2 kompetensi dasar untuk materi pelajaran kelas XII, 4 kompetensi dasar yang terdapat pada materi pelajaran kelas XI dan XII, dan 3 kompetensi dasar materi pelajaran yang dipelajari pada kelas X, XI, dan XII.

Dengan kata lain, pada tahun 2007/2008, dari 50 kompetensi dasar yang diujikan, 35 kompetensi dasar diantaranya yang tidak tuntas atau tidak mencapai standar kelulusan. Pada ujian nasional 2008/2009 dari 50 kompetensi dasar yang diujikan, ada 36 kompetensi dasar yang tidak tuntas atau tidak mencapai standar kelulusan. Pada ujian nasional 2009/2010 terdapat perbaikan yang cukup berarti, yakni dari 50 kompetensi dasar yang diujikan, hanya tinggal 22 kompetensi dasar yang tidak tuntas atau

tidak mencapai standar kelulusan. Walaupun sudah terjadi peningkatan, langkah-langkah perbaikan masih harus terus dilaksanakan.

Bila diamati lebih cermat, tampak bahwa bahwa kemampuan menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca (reading) mahasiswa memang belum memadai pada hampir semua aspek kompetensi yang harus mereka kuasai dalam menghadapi ujian nasional.

Untuk mencari penyelesaian masalah ini, perlu dikaji dahulu faktor-faktor penyebab tidak tuntasnya kompetensi dasar untuk mata pelajaran Bahasa Inggris para siswa di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir ini. Dari hasil analisa data melalui angket, hasil observasi dan FGD yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor penyebab, diantaranya faktor yang berhubungan dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana .

1. Standar isi

Faktor penyebab yang berhubungan dengan standar isi diantaranya adalah: (1) kurang sinkronnya urutan pengajaran materi ajar yang saling berhubungan; dan (2) kurang adanya pengembangan kemampuan siswa dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler seperti *speech contest*, *speaking club*, *debate* dan lain lain yang dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara siswa; (3) tidak diajarkannya lagi Structure (tata bahasa) secara khusus dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami perbedaan structure dan retorika teks dari berbagai jenis teks yang harus mereka pelajari. Sementara dilain pihak siswa dituntut untuk memiliki pengetahuan tata bahasa yang benar, baik dalam menulis maupun ketika berbicara.

2. Standar proses

Faktor penyebab yang berhubungan dengan standar proses diantaranya: (1) Guru masih mengandalkan silabus, RPP dan LKS yang dijual dipasaran, tanpa di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan siswa setempat; (2) Pelaksanaan pembelajaran belum sepenuhnya

mengacu pada RPP; (3) kurangnya pemantauan proses pembelajaran atau supervisi oleh kepala sekolah; (4) guru belum menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan belum mengimplementasikan model pembelajaran yang tergolong *cooperative learning* yang sangat berguna untuk membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar; (5) kurangnya penggunaan media pembelajaran oleh guru, terutama media yang berbasis IT. Padahal, penggunaan media sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi belajar siswa; dan (6) kurang terlaksananya kegiatan *remedial teaching*.

3. Standar kompetensi lulusan

Faktor penyebab yang berhubungan dengan kompetensi lulusan adalah guru belum memberikan pengalaman belajar yang membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. Misalnya dengan mencari informasi dari berbagai sumber, memanfaatkan lingkungan, mengekspresikan diri melalui suatu kegiatan seperti *speech contest*, serta menumbuhkan sikap yang kompetitif dan sportif.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Faktor penyebab yang berhubungan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah: (1) masih ada guru yang mengajar Bahasa Inggris yang latar belakang pendidikannya bukan Bahasa Inggris; (2) masih ada guru yang penguasaan materi pelajarannya kurang baik.

5. Standar sarana dan prasarana

Faktor penyebab yang berhubungan dengan standar sarana dan prasarana adalah: (1) kurang memadainya, atau tidak adanya sama sekali sarana belajar di laboratorium bahasa. Kebanyakan siswa hanya belajar *listening* dengan menggunakan cassette melalui tape recorder, bahkan masih ada yang hanya melalui *dictation* yang dilakukan guru; (2) kurang tersedianya kamus Bahasa Inggris. Sebagian besar siswa tidak punya kamus, bahkan kalau pun mereka punya, mereka tidak membawanya ke sekolah dengan berbagai alasan, seyogianya sekolah menyediakan lebih banyak kamus; (3)

kurang tersedianya materi bacaan Bahasa Inggris di perpustakaan sekolah yang dapat dimanfaatkan siswa untuk menambah pengetahuan dan memperkaya kosa kata mereka. Kurangnya kosa kata ini juga merupakan faktor utama yang menyebabkan siswa tidak dapat memahami isi berbagai jenis teks yang diberikan dengan baik. Tambahan pula biasanya pilihan jawaban yang diberikan pada ujian nasional biasanya hampir sama sehingga menimbulkan keraguan ataupun kebingungan pada siswa

6. Standar pengelolaan

Faktor penyebab yang berhubungan dengan standar pengelolaan adalah kondisi keuangan sekolah yang belum memadai. Secara umum sekolah memang sudah membuat Rancangan Kegiatan Tahunan (RKT) pada setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaannya rancangan itu belum berjalan sebagaimana semestinya. Seakan-akan RKT itu dibuat hanya untuk memenuhi syarat administrasi sekolah saja.

7. Standar Pembiayaan

Faktor penyebab yang berhubungan dengan standar pembiayaan adalah tidak adanya alokasi anggaran khusus sekolah untuk mengembangkan profesionalisme guru untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop dan sejenisnya. Dipihak siswa pula, alokasi dana untuk kegiatan kesiswaan juga minim.

8. Standar Penilaian

Faktor penyebab yang berhubungan dengan standar penilaian adalah: (1) rancangan kriteria penilaian jarang diinformasikan oleh guru kepada siswa, sehingga siswa kurang memahami target apa yang harus mereka miliki dalam proses pembelajaran; (2) tehnik penilaian pada silabus kurang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar; (3) masih kurangnya pengetahuan guru tentang berbagai jenis tehnik penilaian (*assessment*) yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran, sehingga penilaian yang dilakukan guru kebanyakan hanya bersifat penilaian lisan dan tulisan.; (4) kurang

bervariasinya jenis-jenis tes yang diberikan; (5) masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengolahan dan analisis penilaian untuk kemajuan kualitas belajar, hal ini juga menyebabkan kurangnya pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

KESIMPULAN

Persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007-2008 pada mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelompok IPA berturut-turut untuk SMAN 1, Dumai SMAN 2 Tanah Putih dan SMAN 1 Tanah Putih Tanjung Melawan adalah 20%; 48%; dan 50%. Pada tahun 2008-2009 adalah 6%; 30%; dan 68% serta pada tahun 2009-2010 adalah 4% untuk paket A dan 8% untuk paket B; 10% untuk paket A dan 30% untuk paket B; 8% untuk paket A dan 12% untuk paket B.

Untuk kelompok IPS Persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007-2008 pada mata pelajaran Bahasa Inggris berturut-turut untuk SMAN 1, Dumai SMAN 2 Tanah Putih dan SMAN 1 Tanah Putih Tanjung Melawan adalah 22%; 48%; dan 48%. Pada tahun 2008-2009 adalah 8%; 38%; dan 80% serta pada tahun 2009-2010 adalah 0% untuk paket A dan 6% untuk paket B; 10% untuk paket A dan 44% untuk paket B; 8% untuk paket A dan 12% untuk paket B.

Faktor penyebab berasal dari rendahnya beberapa aspek pada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Alternatif Model Pemecahan Masalah adalah: (1) Sosialisasi dan pelatihan KTSP bagi guru mata pelajaran berbasis MGMP; (2) Workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan pemantapan/pendalaman materi bagi guru-guru; dan (3) Pendampingan penerapan perangkat pembelajaran di kelas oleh MGMP dibawah bimbingan guru inti dan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Animonous. 2011. *Program Peningkatan Mutu Lulusan*. <http://www.smp2.pengandon.net/2011/04/08/program-peningkatan-mutu-lulusan/>
- Animous. 2011. *Riau Cerdas*. <http://riaucerdas.blogspot.com>. diakses pada 10 Juni 2011.
- BSNP. 2010. *Laporan Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010*. Depdiknas. Jakarta.
- BSNP. 2011. *Sisialisasi Penyelenggaraan Ujian Nasional 2011 bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs-SMPLB-SMS/MA-SMALB-SMK*. Depdiknas. Jakarta.
- Depdiknas. 2002. *Visi dan Misi Pendidikan Nasional*. http://www.depdiknas.co.id/publikasi/buletin/padu/perdana/padu_00.htm - Depdiknas diakses pada 1 Desember 2007.
- Depdiknas. 2003. *Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Depdiknas.
- Maman. 2009. *Revitalisasi Ujian Nasional*. Jurnal Ilmiah Kreatif. Volume VI No. 1. Januari 2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pujiharti, Y. 2007. *Evaluasi Pendidikan dan Ujian Akhir Nasional (UN)*. Paradigma, Tahun XII, No. 24. Juli – Desember 2007. IKIP Budi Utomo. Malang.
- Subagiyo, Bambang. 2008. *Kajian Hasil Ujian Nasional Sisa SMP, SMA dan SMK do Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008*. Dadikta, Volume 9 No. 3.
- Umar, La Sulo. 1994 *Pengantar Pendidikan*. Dirjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional